
EKONOMI HIJAU PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Oleh

Maskur

Universitas Madako Tolitoli, Tolitoli, Sulawesi Tengah

E-mail: maskurmahmud5@email.com

Article History:

Received: 23-06-2026

Revised: 18-07-2026

Accepted: 26-07-2026

Keywords:

Green Economy,
Sustainable
Development, Energy
Transition, Indonesia,
Environmental Policy.

Abstract: *The green economy offers a development approach aimed at enhancing public well-being and social equity while simultaneously reducing environmental risks and natural resource scarcity. Adopting a green economy is crucial for Indonesia, as economic growth remains closely linked to natural resource utilization, while climate change, ecosystem degradation, pollution, and social inequality persist as unavoidable challenges. The aim of this study is to examine the theoretical foundations underlying green economic policy in Indonesia, as well as the prospects, challenges, opportunities, and the way forward. The research employs a qualitative, descriptive literature review approach, evaluating scientific publications, reports from international institutions, and national policy documents. Studies indicate that the green economy can foster sustainable agriculture, the circular economy, renewable energy, resource efficiency, and low-emission transportation. However, reliance on fossil fuels, investment and technology requirements, regulatory uncertainty, disparities in regional capacity, and the risk of uneven social impacts are obstacles hindering its implementation. According to this study, the green economic transition will succeed if there are consistent cross-sectoral policies, sustainable financing, social protection, public participation, and performance measurement that encompasses environmental, economic, and social aspects.*

PENDAHULUAN

Selama bertahun-tahun, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), investasi yang meningkat, dan penciptaan lapangan kerja adalah cara yang paling umum untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Meskipun penting, ukuran tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pembangunan. Jika pertumbuhan dilakukan dengan menguras sumber daya alam, merusak ekosistem, dan meningkatkan emisi, itu dapat menyebabkan masalah kesehatan, penghidupan, dan ketahanan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Ini adalah masalah yang dihadapi Indonesia dalam situasi yang kompleks. Selain memiliki kebutuhan besar untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan, negara ini memiliki kekayaan hutan, laut, mineral, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Untuk

mengurangi emisi, perlu mempertimbangkan daya saing industri, kebutuhan energi, dan kesejahteraan masyarakat karena banyak sektor bergantung pada pemanfaatan lahan dan energi fosil.

Salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah ini adalah ekonomi hijau. Ekonomi hijau didefinisikan oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) sebagai ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sambil menurunkan risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNEP, 2011). Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan ekonomi dan bukanlah hanya biaya pembangunan. Tiga pertanyaan utama dibahas: (1) bagaimana teori dan konsep ekonomi hijau menjelaskan hubungan antara ekonomi, masyarakat, dan lingkungan; (2) apa peluang yang mungkin ada di Indonesia; dan (3) kebijakan dan tantangan apa yang diperlukan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

TELAAH LITERATUR DAN LANDASAN TEORI

1. Konsep Ekonomi Hijau

Tidak ada definisi operasional ekonomi hijau yang disepakati oleh semua negara dan lembaga. Secara umum, gagasan ini menekankan tiga hal: penggunaan sumber daya yang efisien, pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, dan peningkatan kesejahteraan yang inklusif. Oleh karena itu, ekonomi hijau tidak sama dengan menghentikan pembangunan atau menghapus semua aktivitas ekstraktif. Mengubah produksi dan konsumsi adalah tujuannya agar dampak lingkungan berkurang, keuntungan ekonomi lebih merata, dan daya dukung alam tetap ada. Konsep ini sangat terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang berarti pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (WCED, 1987). Ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah semua aspek pembangunan berkelanjutan. Salah satu cara untuk menerapkan prinsip-prinsip ekologi ke dalam kebijakan dan aktivitas ekonomi adalah dengan menerapkan ekonomi hijau.

2. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Sebagaimana dijelaskan oleh teori pembangunan berkelanjutan, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam laporan *Our Common Future* (1987), World Commission on Environment and Development (WCED) membuat definisi ini. Gagasan tersebut menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan dampak yang disebabkan oleh kegiatan manusia terhadap lingkungan dan jumlah sumber daya alam yang terbatas. Menurut teori pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi harus mempertimbangkan keadilan antargenerasi dan batas ekologis. Sumber daya alam dan jasa ekosistem seperti penyediaan air, penyerapan karbon, kesuburan tanah, dan perlindungan pesisir memiliki nilai ekonomi, tetapi nilai ini tidak selalu ditunjukkan dalam harga pasar. Keputusan investasi dan produksi yang mengabaikan nilai dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan. Menurut perspektif ini, pertumbuhan PDB tidak cukup untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Kualitas pekerjaan, kesehatan lingkungan, ketahanan pangan, akses energi, dan pemerataan manfaat juga perlu dipertimbangkan. Karena kerusakan ekosistem dapat mengurangi produktivitas pertanian,

perikanan, dan pariwisata serta meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana, prinsip ini relevan bagi Indonesia.

3. Teori Eksternalitas dan Kegagalan Pasar

Dampak kegiatan produksi atau konsumsi terhadap pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam transaksi dan tidak tercermin sepenuhnya dalam harga pasar dikenal sebagai eksternalitas. Eksternalitas dapat bersifat positif atau negatif, seperti manfaat sosial dari pendidikan dan vaksinasi, atau negatif, seperti pencemaran udara akibat aktivitas industri (Mankiw, 2021). Harga pasar tidak mewakili semua biaya dan manfaat sosial suatu kegiatan ketika biaya atau manfaat tersebut tidak diperhitungkan. Dalam teori ekonomi kesejahteraan, biaya marjinal sosial lebih besar daripada biaya marjinal privat karena eksternalitas negatif. Akibatnya, pasar cenderung menghasilkan atau mengonsumsi barang yang menghasilkan tingkat pencemaran yang lebih tinggi daripada tingkat yang ideal untuk masyarakat. Sebaliknya, eksternalitas positif dapat menyebabkan penyediaan barang atau kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat menjadi terlalu rendah karena individu hanya mempertimbangkan keuntungan pribadi mereka (Pigou, 1920). Ketika mekanisme pasar tidak mengalokasikan sumber daya secara efektif secara sosial, hal itu disebut "kegagalan pasar". Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat menerapkan pajak atas kegiatan yang menimbulkan eksternalitas negatif, memberikan subsidi untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat sosial, menetapkan standar lingkungan, atau menerapkan sistem izin dan batas emisi.

4. Ekonomi Ekologis dan batas Daya Dukung

Ekonomi ekologis melihat perekonomian sebagai bagian dari sistem sosial dan lingkungan yang lebih luas. Ini berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional, yang biasanya menganggap alam sebagai penyedia sumber daya dan penerima limbah. Pendekatan ekonomi ekologis menekankan bahwa aktivitas ekonomi bergantung pada fungsi ekosistem dan bahwa kondisi biofisik bumi membatasi aktivitas ekonomi (Costanza *et al.*, 1997). Daya dukung lingkungan kemampuan lingkungan untuk menyediakan sumber daya dan menyerap limbah tanpa mengalami kerusakan yang mengganggu fungsi ekosistem adalah salah satu konsep penting dalam ekonomi ekologis. Konsep ini terkait dengan gagasan bahwa terdapat batas ekologis bagi pemanfaatan alam. Pencemaran, kelangkaan sumber daya, dan perubahan iklim dapat terjadi jika penggunaan sumber daya dan pembuangan limbah melampaui kapasitasnya. Daly (1990) menekankan bahwa skala ekonomi sangat penting untuk menjaga batas ekologi, bersama dengan distribusi sumber daya yang adil dan efisien. Selain itu, batas-batas planet menjelaskan bahwa beberapa proses di sistem bumi memiliki batas aman yang harus dijaga untuk mengurangi risiko perubahan lingkungan yang signifikan (Rockstrom *et al.*, 2009). Teori ini relevan untuk menilai pembangunan sektor energi, pertanian, kehutanan, dan industri di Indonesia. Agar kegiatan ekonomi tidak melampaui batas ekologis, kebijakan pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan daya pulih ekosistem, efisiensi sumber daya, dan pemerataan manfaat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih untuk menguraikan peluang dan tantangan penerapan ekonomi hijau serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia

berdasarkan teori, kebijakan, dan temuan penelitian terdahulu. Penelitian tidak melakukan pengukuran langsung terhadap responden, melainkan menganalisis informasi dari sumber tertulis yang relevan. Fokus penelitian meliputi: Konsep dan prinsip ekonomi hijau serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan penelusuran pustaka. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci, seperti ekonomi hijau Indonesia, pembangunan berkelanjutan, transisi energi, ekonomi sirkular, dan kebijakan lingkungan. Sumber dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit, kejelasan metode, serta kemutakhiran informasi. Dokumen yang digunakan dicatat identitasnya dan dikelompokkan menurut tema. Analisis dilakukan secara tematik melalui tahapan berikut: Seleksi data, pengelompokan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai jenis sumber yang kredibel. Peneliti juga memeriksa konsistensi data, konteks penerbitan, dan tahun publikasi agar kesimpulan tidak bergantung pada satu dokumen atau sudut pandang saja. Batasan Penelitian Penelitian ini bergantung pada ketersediaan dan kualitas data sekunder sehingga tidak menggambarkan secara langsung pengalaman seluruh kelompok masyarakat atau kondisi setiap daerah. Hasil penelitian karena itu bersifat analitis dan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan melalui wawancara, survei, atau studi kasus daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori dan Konsep Ekonomi Hijau: Hubungan Ekonomi, Masyarakat, dan Lingkungan

Ekonomi hijau mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan bisnis berkorelasi satu sama lain. Sumber daya alam dan energi diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi penggunaan yang tidak terkendali dapat merusak lingkungan, mengurangi produktivitas masyarakat, dan mengancam keberlanjutan ekonomi. Akibatnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui peningkatan produksi atau pendapatan, tetapi juga melalui efeknya terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Dalam ekonomi hijau, lingkungan bukan hanya sumber bahan baku; itu juga menyediakan berbagai manfaat bagi ekosistem, seperti air bersih, kesuburan tanah, penyimpanan karbon, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Jika manfaat lingkungan tidak dipertimbangkan dalam keputusan produksi dan konsumsi, masyarakat luas dapat bertanggung jawab atas biaya kerusakan, yang merupakan bentuk eksternalitas negatif yang dapat menyebabkan kegagalan pasar. Contohnya, kerusakan ekosistem dan biaya kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran mungkin tidak tercermin dalam harga produk yang dihasilkan. Ekonomi hijau tidak berarti menghentikan pembangunan atau semua aktivitas industri; sebaliknya, itu berarti mengarahkan kegiatan ekonomi agar menghasilkan nilai tambah dengan tekanan lingkungan yang lebih rendah, dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan energi yang lebih efisien, melindungi modal alam, dan membagi manfaat pembangunan secara lebih inklusif.

Hubungan ketiga unsur tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Ekonomi bertanggung jawab atas pendapatan, pekerjaan, dan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat.
- b. Melalui kesempatan kerja dan paparan terhadap polusi dan perubahan lingkungan,

masyarakat sama-sama menjadi pelaku dan penerima dampak pembangunan.

- c. Meskipun memiliki daya dukung yang terbatas, lingkungan mendukung kehidupan ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan perlindungan lingkungan harus diimbangi. Agar transisi menuju ekonomi hijau tidak membebankan biaya perubahan secara tidak proporsional kepada pekerja, masyarakat berpendapatan rendah, atau daerah yang bergantung pada sektor intensif karbon.

2. Peluang Ekonomi Hijau di Indonesia

Karena kekayaan sumber daya alamnya, besarnya pasar domestik, dan kebutuhan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan ekonomi, Indonesia memiliki banyak peluang untuk mengembangkan ekonomi hijau.

a. Pengembangan Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi

Diversifikasi pasokan energi dapat dibantu oleh potensi energi surya, air, panas bumi, angin, dan bioenergi. Selain pembangunan pembangkit, ada peluang untuk meningkatkan efisiensi energi di bangunan, industri, transportasi, dan rumah. Pengembangan sektor ini dapat mendorong investasi, inovasi, dan permintaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan baru. Namun, keuntungan bergantung pada jaringan listrik yang siap, pembiayaan, teknologi, dan kepastian kebijakan.

b. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Berkelanjutan

Produksi dapat dipertahankan dalam jangka panjang melalui praktik pertanian yang mempertahankan kualitas tanah dan air, agroforestri, pengelolaan hutan lestari, dan perikanan yang bertanggung jawab. Selain itu, pendekatan ini dapat meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat desa. Perlindungan hak masyarakat lokal, akses pasar, pendampingan teknis, dan dukungan bagi petani dan nelayan harus disertakan dalam pelaksanaannya.

c. Ekonomi Sirkular dan Pengelolaan Limbah

Ekonomi sirkular mendorong penggunaan produk dan bahan untuk jangka waktu yang lebih lama melalui penggunaan kembali, pengurangan, perbaikan, dan daur ulang. Di Indonesia, hal-hal seperti manajemen sampah, pemanfaatan kembali bahan baku, pengolahan limbah organik, dan desain produk yang lebih mudah diperbaiki atau didaur ulang adalah potensi. Kegiatan ini dapat menurunkan tekanan pada tempat pembuangan akhir dan sumber daya alam, serta membuka peluang usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

d. Transportasi dan Kota yang Lebih Berkelanjutan

Kemacetan dan polusi dapat dikurangi dengan meningkatkan transportasi umum, kendaraan ramah lingkungan, jalur pejalan kaki dan sepeda, dan perencanaan kota yang mengurangi jumlah perjalanan. Selain itu, kebijakan tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik dan pekerjaan. Untuk mencapai keberhasilan, transportasi dan tata ruang harus diintegrasikan, serta layanan yang aman, murah, dan dapat diandalkan.

e. Pembiayaan Hijau dan Penciptaan Pekerjaan

Dibutuhkan pembiayaan hijau karena kebutuhan investasi untuk energi bersih, efisiensi, restorasi ekosistem, dan infrastruktur tahan iklim meningkat. Pada saat yang sama,

perubahan yang terjadi di bidang ekonomi memiliki potensi untuk menciptakan pekerjaan baru. Namun, pekerjaan yang tumbuh harus memenuhi standar kerja yang layak, dan karyawan dari industri yang terdampak harus mendapatkan pelatihan dan dukungan selama transisi.

Singkatnya, peluang ini dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi Indonesia. Namun, itu tidak otomatis terjadi hanya karena ada sumber daya alam. Kualitas tata kelola, kepastian regulasi, kesiapan infrastruktur, akses pembiayaan, dan keterlibatan masyarakat menentukan apakah manfaat ekonomi hijau dapat dirasakan secara luas.

3. Kebijakan dan Tantangan untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

a. Arah Kebijakan yang Diperlukan

Pertama, mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Perencanaan pembangunan, kebijakan sektoral, tata ruang, dan penganggaran harus mempertimbangkan keberlanjutan. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang harus dipertimbangkan saat menilai kebijakan, tetapi juga efeknya terhadap pemerataan manfaat, kualitas lingkungan, kesehatan, pekerjaan, dan emisi.

Kedua, memperkuat insentif ekonomi dan mengurangi insentif yang bertentangan.

Dengan menggunakan pajak, standar, batas emisi, dan insentif untuk teknologi bersih, biaya lingkungan dapat dimasukkan ke dalam keputusan ekonomi. Pada saat yang sama, dukungan publik harus diperiksa untuk menghindari penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Perubahan insentif harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan dampak terhadap konsumen dan kelompok rentan.

Ketiga, memperluas investasi dan akses pembiayaan hijau.

Untuk memastikan bahwa transisi tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar, pemerintah dapat mendorong investasi melalui kepastian regulasi, standar proyek yang transparan, dan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sektor. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan akses ke pembiayaan bagi UMKM, koperasi, pemerintah daerah, dan proyek berbasis masyarakat.

Keempat, meningkatkan kapasitas manusia dan mendukung transisi yang adil. Keterampilan yang diperlukan untuk sektor energi bersih, efisiensi, pengelolaan limbah, dan pemulihan ekosistem harus disesuaikan dengan pendidikan dan pelatihan. Pekerja dan daerah yang bergantung pada industri yang berubah harus terlibat dalam perencanaan, dan mereka harus memiliki akses ke pelatihan, perlindungan sosial, dan peluang kerja alternatif.

Kelima, memperkuat tata kelola dan penegakan aturan.

Kebijakan lingkungan memerlukan pengawasan yang konsisten, keterbukaan informasi, koordinasi antarlembaga, dan penegakan hukum. Pelibatan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan penerimaan publik.

Keenam, membangun sistem pemantauan dan evaluasi.

Indikator yang jelas harus digunakan untuk mengukur kemajuan. Ini termasuk efisiensi energi dan material, perubahan emisi, kualitas air dan udara, kondisi ekosistem, akses ke layanan, kualitas pekerjaan, dan pemerataan manfaat. Dampak yang tidak merata

dapat diidentifikasi dengan menggunakan data yang terbuka dan terpilah menurut wilayah dan kelompok masyarakat.

b. Tantangan Utama

Kebutuhan Pembiayaan dan Teknologi.

Perusahaan kecil dan pemerintah daerah mungkin menghadapi masalah modal, informasi, dan akses terhadap teknologi. Perubahan infrastruktur dan proses produksi membutuhkan investasi besar.

Ketergantungan pada Sektor dan Infrastruktur Intensif Karbon.

Perubahan menuju sistem rendah emisi dapat berlangsung lambat ketika kegiatan ekonomi, jaringan energi, dan aset yang telah ada masih bergantung pada bahan bakar fosil. Transisi perlu dirancang agar pasokan energi tetap andal dan biaya perubahan dapat dikelola.

Kesenjangan Kapasitas dan Keterampilan.

Tidak semua daerah memiliki tenaga ahli, lembaga pelatihan, atau kemampuan teknis yang sama. Tanpa pengembangan kapasitas, peluang ekonomi hijau berisiko terkonsentrasi di wilayah dan kelompok tertentu.

Dampak Sosial yang Tidak Merata.

Kebijakan lingkungan dapat menaikkan biaya bagi sebagian rumah tangga atau mengubah sumber pendapatan pekerja dan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, kebijakan perlu disertai perlindungan sosial, konsultasi publik, dan langkah untuk memperluas manfaat.

Koordinasi dan Penegakan Kebijakan.

Kebijakan yang tidak konsisten atau tumpang tindih dapat membuat investor dan masyarakat tidak yakin. Pengawasan yang buruk juga dapat menyebabkan standar lingkungan tidak menghasilkan perubahan yang signifikan.

Keterbatasan Data dan Pengukuran.

Data yang tidak lengkap atau tidak sebanding antarwilayah membuat penilaian dampak kebijakan lebih sulit. Agar kemajuan dapat diukur dengan benar, sistem pemantauan lingkungan, pelaporan bisnis, dan statistik harus diperkuat.

SINTESIS PEMBAHASAN

Menurut penelitian ini, ekonomi hijau memberikan dasar yang dapat digunakan untuk mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Dalam hal energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, ekonomi sirkular, transportasi, dan pembiayaan hijau, Indonesia memiliki banyak peluang. Namun, untuk memanfaatkannya, diperlukan kebijakan yang konsisten, investasi, kapasitas manusia, tata kelola, dan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak.

Oleh karena itu, alih-alih hanya menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, ekonomi hijau harus dilihat sebagai proses perubahan sistem ekonomi. Pembangunan berkelanjutan akan lebih mungkin dicapai jika kebijakan dapat mempertimbangkan biaya lingkungan, membagi keuntungan secara adil, dan memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak akan mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

KESIMPULAN

1. Hubungan Ekonomi, Masyarakat, dan Lingkungan

Menurut teori dan konsep ekonomi hijau, lingkungan, masyarakat, dan ekonomi berkorelasi satu sama lain. Kegiatan ekonomi membutuhkan sumber daya alam dan

memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, bukan hanya peningkatan produksi atau pendapatan yang menentukan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga efisiensi penggunaan sumber daya, pemerataan manfaat, dan kemampuan untuk menjaga ekosistem. Ekonomi hijau mendorong agar biaya kerusakan lingkungan dipertimbangkan saat membuat keputusan ekonomi dan agar keuntungan pembangunan dirasakan secara lebih luas.

2. Peluang Ekonomi Hijau di Indonesia

Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan ekonomi hijau dengan menerapkan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, pertanian ramah lingkungan, pengurangan sampah, dan pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan. Investasi, kemajuan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja hijau dapat didorong oleh ketersediaan sumber daya alam dan luasnya pasar domestik. Peluang tersebut dapat mengurangi tekanan lingkungan dan meningkatkan daya saing ekonomi jika dikelola dengan baik.

3. Kebijakan dan Tantangan yang Diperlukan

Kebijakan yang konsisten dan terintegrasi diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk insentif untuk investasi yang mengurangi emisi, pengembangan energi bersih dan transportasi berkelanjutan, penerapan standar lingkungan, pengelolaan sampah, dan perlindungan ekosistem.

Pembiayaan yang memadai, kepastian regulasi, pengawasan dan penegakan hukum, dan dukungan untuk penelitian, teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja harus menjadi komponen kebijakan. Ketergantungan pada energi fosil, kebutuhan investasi besar, kesenjangan kapasitas antardaerah, dan potensi efek transisi terhadap pekerja dan masyarakat rentan adalah masalah utama. Oleh karena itu, transisi ke ekonomi hijau harus dilakukan secara bertahap dan adil dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan komunitas lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2021). *Low Carbon Development: A Paradigm Shift Towards a Green Economy in Indonesia*.
- Costanza, R., et al. (1997). *An Introduction to Ecological Economics*. Daly, H. E. (1990). "Toward Some Operational Principles of Sustainable Development." Rockström, J., et al. (2009). "A Safe Operating Space for Humanity".
- Ellen MacArthur Foundation. (2013). *Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition*. Ellen Mac Arthur Foundation.
- International Labour Organization (ILO). (2015). *Guidelines for a Just Transition Towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All*.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics (9th ed)*. Cengage Learning.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). *Towards Green Growth*. OECD Publishing.
- Pearce, D. W., Markandya, A., & Barbier, E. B. (1989). *Blueprint for a Green Economy*. Earthscan.
- Pigou, A. C. (1920). *The Economics of Welfare*. Macmillan.
- United Nations Environment Programme. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. UNEP.

United Nations Framework Convention on Climate Change. (2015). *Paris Agreement*. United Nations.

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN